



### INFORMASI PUBLIK

## KI Banten Dorong Bentuk PPID di SMA SMK

**SELURUH SMA SMK** di Provinsi Banten diketahui belum memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Selain itu, banyak juga kepala sekolah yang belum mengetahui peran dan fungsi PPID tersebut.



FACEBOOK ADE JAHKAN

### Ade Jahran

Komisioner Komisi Informasi  
Provinsi Banten

Hal tersebut dikatakan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, Ade Jahran, Senin (4/9). "Sekolah merupakan badan publik, sehingga wajib memiliki PPID. Harus taat dengan Undang-Undang KIP. Bahkan, kepek saja belum tahu PPID," kata Ade Jahran, kepada wartawan, kemarin.

Ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk segera membentuk PPID di tiap sekolah.

► Ke halaman 14

### KI Banten...

"Dindikbud dan Dinas Kominfo harus menyosialisasikan ke sekolah-sekolah tentang PPID," ucapnya.

Saat ini KI Banten menerima permohonan sengketa informasi terhadap 177 SMA SMK di Banten yang dimohonkan seorang warga Lebak bernama M Ojat Sudrajat. "Ada 177 SMA SMK negeri yang disengketakan oleh warga Lebak M. Ojat Sudrajat. Sebenarnya ini ada hikmahnya, jadi paling tidak SMA SMK itu mengetahui KIP, mengetahui PPID, dan actionnya membentuk PPID di sekolah masing-masing," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemprov Banten sudah mengeluarkan kebijakan melalui surat keputusan (SK) Gubernur No. 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan PPID di lingkungan Pemprov Banten tertanggal 27 Maret 2017. "Pada lampiran SK tersebut nomor 98 bahwa para kepala sekolah SMA SMK negeri se-Banten itu harus membentuk PPID karena merupakan badan publik. Terkait hal ini kami sudah komunikasikan ke kepala Dindik Banten. Mudah-mudahan 2018 sudah terbentuk PPID di sekolah," kata Ade.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dindikbud Provinsi Banten E Kosasih Samanhudi mengaku akan segera membentuk PPID di setiap SMA SMK se-Banten. Rencananya, PPID akan dibentuk pada APBD Perubahan 2017. "Tentu Dindik berkomitmen akan hal itu. Secepatnya, rencananya di 2017 ini, kan itu tidak memerlukan anggaran besar. Tinggal

Dari hlm 13

*Tentu Dindik berkomitmen akan hal itu. Secepatnya, rencananya di 2017 ini, kan itu tidak memerlukan anggaran besar. Tinggal bentuk, berikan tugas dan tanggung jawab seperti apa. Mudah-mudahan di perubahan 2017 ini."*

### E Kosasih

Kepala Dindikbud Provinsi Banten

bentuk, berikan tugas dan tanggung jawab seperti apa. Mudah-mudahan di perubahan 2017 ini," kata Engkos, melalui sambungan telepon, kemarin.

Ia mengungkapkan, pada triwulan III 2017 ini, alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu berada pada pos belanja langsung. Sehingga, kata Engkos, kedudukan sekolah layaknya perangkat daerah. "Jadi mereka nanti ada KPA (kuasa pengguna anggaran), bendahara, seperti OPD saja, jadi satuan kerja. Oleh karena itu, memang PPID ini harus dibentuk untuk membantu program mereka juga, selain itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya. (rbnn/air/ags)